



ISSN. 1411 - 0261

# DISIPLIN

Volume 23

Nomor : 10

Bulan Desember Tahun 2016

- Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang.  
Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn.
- Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Oleh : Hj. Erleni, SH., MH.
- Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.  
Oleh : H. Darmadi Djufri. SH., MH.
- Pencegahan Tindak Pidana Perikanan Melalui Peran Masyarakat.  
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Menegakkan Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia.  
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (*Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan*).  
Oleh : Warmiyana. SH., MH.
- Kompetensi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Beberapa Daerah Hukum Pengadilan Negeri.  
Oleh : Hendri S., SH., M.Hum.
- Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri.  
Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*



Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai Majalah enam bulan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai Forum Komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

**SURAT KEPUTUSAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA  
Nomor : 170. SHDPD.b.12.1996**

Pelindung	: 1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. 2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S,Si., M.Si. 3. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.
Pimpinan Umum	: Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab	: H. Umariddin Latief, SH., MH.
Sekretaris Redaksi	: Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.
Penyunting	: 1. Dr. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum. 2. M. Erwin, SH.,M.Hum. 3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.
Desain Grafis	: Amir Syarifuddin, SH.
Tata Usaha Bidang Sirkulasi	: 1. Hendri. S., SH., M.Hum. 2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.
Penerbit	: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA
Pencetak	: Percetakan K A N A R I
Alamat redaksi / Redaksi	: Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610 Palembang Telp. (0711) 418873

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat. Redaksi mengundang para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, karyawan, untuk menulis dan memberikan kritik yang objektif, konstruktif dengan penuh rasa tanggung jawab.

Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan tetapi dengan tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi ganda diatas kertas polio.

Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya.

Tulisan, Saduran, Terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis.

**Majalah DISIPLIN** ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA khususnya.

## DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 23 No. 10 - Desember 2016

	Halaman
- Dari Redaksi .....	I
- Daftar Isi .....	II
1. Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang. Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn. ....	1-7
2. Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh : Hj. Erleni, SH., MH. ....	8-19
3. Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. Oleh : H. Darmadi Djufri. SH., MH. ....	20-26
4. Pencegahan Tindak Pidana Perikanan Melalui Peran Masyarakat. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. ....	27-36
5. Menegakkan Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia. Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum ....	37-43
6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang ( <i>Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan</i> ). Oleh : Warmiyana. SH., MH. ....	44-51
7. Kompetensi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Beberapa Daerah Hukum Pengadilan Negeri. Oleh : Hendri S., SH., M.Hum. ....	52-60
8. Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri. Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum. ....	61-82

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL  
127 AYAT (1) JO. PASAL 112 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA.

Oleh : Hj. Erleni, SH., MH.

**Abstrak**

Penerapan hukum pidana Materiil yang di terapkan oleh Hakim dalam perkara putusan Nomor : 639 / Pid.Sus / 2014 / PN.Plg. terhadap tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" adalah tepat. Unsur-Unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Upaya Penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah dengan Program kegiatan Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Dengan memfokuskan pada tiga bidang, yaitu :

- a. Supply reduction (pemberantasan jaringan sindikat Narkoba).
- b. Primary Demand Reduction (aktualisasi partisipasi masyarakat).
- c. Demand reduction (penyembuhan penyalahguna Narkotika).

**Kata Kunci :** Pemberantasan, Penerapan

**Abstract**

Material application of criminal law is applied by the judge in the case decision No. 639 / Pid.Sus / 2014 / PN.Plg. on criminal acts "without rights and illegally misusing Narcotics Group I in the form of not plant for yourself" is right. The elements are proven legally and convincingly guilty defendant is Article 127 Paragraph (1) Republic Act # 35 of 2009 on Narcotics Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st Criminal Code.

Efforts against criminal abuse of Narcotics is the activities program Prevention, Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics (P4GN) on criminal acts committed Narcotics National Narcotics Agency By focusing on three areas, namely:

- a. Supply reduction (combating drug syndicate).
- b. Primary Demand Reduction (actualization of

public participation).

c. Demand reduction (healing narcotics abuser).

**Keywords:** Eradication, Application

**A. Latar Belakang**

Napza adalah singkatan dari narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah "NARKOBA" singkatan dari kata narkotika, obat berbahaya. Napza maupun NARKOBA istilah yang sekarang marak dipergunjingkan dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti mati lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris Narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pedagang bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak warga negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pedagang narkoba kelas kakap. Sebagai contoh kecil diantaranya telah ditangkap, tapi sebagai contoh besar lainnya tampaknya masih beroperasi secara leluasa.

Orang yang sudah kecanduan narkoba biasanya sangat sulit keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuhnya agar bisa mendapatkan narkoba. Bahkan pada beberapa orang yang taraf kecanduannya sudah sangat akut dan bermain-main dengan kematian pun akan ditempuh dan dilaluinya, asal bisa mendapatkan narkoba. Para pecandu dan pemakai baru **the new**

# AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP EKSEKUSI ATAS HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT DI PENGADILAN NEGERI

Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum.

## Abstrak

Dengan adanya penghentian pelaksanaan terhadap semua keputusan hakim yang dijatuhkan sebelum pernyataan pailit, hal ini akan memberikan suatu ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor dengan pihak ketiga atau penggugat yang dimenangkan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menghentikan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Dengan adanya penghentian putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit oleh Pengadilan Niaga dan debitor yang beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga atau penggugat seperti dalam hal berkurangnya harta pailit dan lampaunya waktu yang telah ditetapkan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan hukum normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor, maka secara langsung mengakibatkan segala bentuk putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit. Rasio hukum putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang

menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit satu diantaranya adalah pemindahan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Umum kepada Pengadilan Niaga Untuk dapat memperlancar proses pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan eksekusi yang bersamaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri atas harta kekayaan debitor pailit hendaknya, Pengadilan Niaga mempunyai wewenang untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diberikan perlindungan yang wajar kepada pihak ketiga (penggugat), dalam hal melakukan tugasnya kurator hendaknya tanpa ada itikad buruk, dimana apabila kurator melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan pihak ketiga, ia harus diberikan sanksi sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Debitor, Kreditor, Penggugat.

## Abstract

With the termination of the implementation of all decisions of judges who sentenced before the declaration of bankruptcy, it will provide an uncertainty about the legal relationship that exists between the debtor with a third party or the plaintiff won in the District Court in connection with the decision of the Commercial Court that stopped the execution of the assets of debtors bankruptcy. With their termination District Court decision that sets the execution on the assets the debtor bankrupt by the Commercial Court and the debtor bad faith or uncooperative can menyebabkan losses for a third party or the plaintiff as in terms of reduced bankruptcy estate and the lapse of time that has been set, This type of research in writing this essay, namely the writing of normative law is a procedure of scientific research to find out the truth based on the logic of the scientific laws of the normative and the logic of science is firmly on normative legal research builds upon scientific disciplines and ways of doing science normative law is the science of law the object of the law itself. With the decision of a declaration of bankruptcy debtors, then directly result in any form of the judge's decision that had been laid before the declaration of bankruptcy was issued, otherwise unenforceable.

This suggests the existence of a form of competencies possessed by the Commercial Court to stop the District Court's decision that sets the